

**TESIS**

**STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA  
DALAM MENINGKATKAN KONTRIBUSI  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA**

*Tourism Sector Development Strategy in Increasing Locally  
Generated Revenue of North Toraja District*

**MEIGI  
A042191004**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITA HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**TESIS**

**STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA  
DALAM MENINGKATKAN KONTRIBUSI  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA**

*Tourism Sector Development Strategy in Increasing Locally  
Generated Revenue of North Toraja District*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**MEIGI  
A042191004**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDY MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITA HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**TESIS**

**STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA  
DALAM MENINGKATKAN KONTRIBUSI  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA**

disusun dan diajukan oleh

**MEIGI  
A042191004**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 26 Juli 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Musran Munizu, S.E., M.Si., CIPM  
NIP. 197709092000121001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hamrullah, S.E., M.Si  
NIP. 196812211995121001

Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si  
NIP. 197106192000031001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si  
NIP. 196402051988101001

## TESIS

# STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

disusun dan diajukan oleh

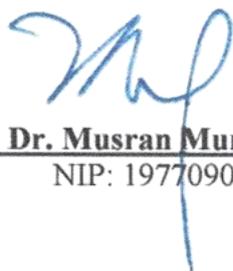
**MEIGI**  
**A042191004**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 26 Juli 2021

Komisi Penasehat

Ketua



**Prof. Dr. Musran Munizu, S.E., M.Si., CIPM**  
NIP: 197709092000121001

Anggota



**Dr. Hamrullah, S.E., M.Si**  
NIP. 196812211995121001

Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah,



**Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si**  
NIP. 197106192000031001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M E I G I

NIM : A042191004

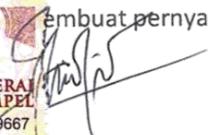
Program Studi : Manajemen Keuangan Daerah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul :

**STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perubahan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003 , pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 26 Juli 2021  
Membuat pernyataan  
  
  
**M E I G I**  
A042191004

## **PRAKATA**

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr. Musran Munizu, S.E.,M.Si.,CIPM dan Dr. Hamrullah, S.E.,M.Si Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama penulis menyusun tesis ini.
4. Dr. Kalatiku Paembonan, SE., M.Si, (Bupati Toraja Utara 2016-2021) dan Yohanis Bassang SE, M.Si (Bupati Toraja Utara sekarang) yang telah memberikan ijin dan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan jenjang Magister pada Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
5. Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.,CRA.,CRP.,CWM Ketua Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktu, kesempatan dan senantiasa mendukung kesuksesan dan penyelesaian tesis ini.

6. Prof. Dr. H. Syamsu Alam, SE., M.Si, Dr. Asri Usman, SE., M.Si., Ak., CA, Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M.Si, sebagai Tim penilai yang telah memberikan arahan dan masukan selama ujian dan proses penyelesaian tesis ini.
7. Terkhusus kepada keluarga penulis yang selama mengikuti pendidikan tersita waktu dan perhatiannya, dan teman - teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Penulis

**MEIGI**

## ABSTRAK

**MEIGI.** *Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara* (dibimbing oleh Musran Munizu dan Hamrullah).

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi yang dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Toraja Utara.

Populasi adalah pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Ekonomi Setda, dan pengunjung objek wisata di Kabupaten Toraja Utara. Penentuan sampel dilakukan secara purposif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam upaya pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara adalah melakukan pemetaan terhadap sektor pariwisata dan potensi *network* pemasaran, melaksanakan dan memonitoring pengembangan pariwisata, dan melakukan pemerintahan desa dengan menggunakan sistem teknologi informasi seperti: administrasi pengelolaan setiap objek wisata, keuangan, dan jasa pariwisata dengan sistem komputerisasi.

Kata kunci: pariwisata, pendapatan asli daerah (PAD), Kabupaten Toraja Utara



## ABSTRACT

**MEIGI.** *Tourism Sector Development Strategy in Increasing Locally Generated Revenue of North Toraja District* (Supervised by **Musran Munizu** and **Hamrullah**)

The population of this research was the officers of Department of Culture and Tourism, Income Office Region, Secretariat Economy Section, and tourist attraction visitors in North Toraja. In sample determination, the research used purposive sampling technique.

Based on the research result, it can be concluded that the strategy in tourism development effort in order to increase PAD of North Toraja District is to do mapping of the tourism sector and marketing network potential, improves human resources by doing direct guidance to accelerate the development in sociocultural aspect, the improvement of tourism manger and administrator capacity, trains and guides planning, implementation and monitoring of tourism development, and does village governance by using the information technology system, such as the management administration of each tourism objects, finance, and tourism services using computerized system.

Keywords: Tourism, Locally Generated Revenue (PAD), North Toraja District



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PRAKATA .....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABASTRAK</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Desentralisasi Fiskal: Aspek Teori.....	10
2.2 Pendapatan Asli Daerah .....	14
2.3 Potensi Peningkatan PAD dari Pariwisata.....	15
2.4 Konsep Pariwisata.....	17
2.5 Prinsip Dasar Kebijakan Pengelolaan Pariwisata .....	19
2.6 Dampak Positif Pariwisata Bagi Perekonomian .....	21
2.6.1 Pendapatan dari Penukaran Valuta Asing .....	21
2.6.2 Menyehatkan Neraca Perdagangan Luar Negeri .....	22
2.6.3 Pendapatan dari Usaha atau Bisnis Pariwisata .....	22
2.6.4 Pendapatan Pemerintah.....	23
2.6.5 Penyerapan Tenaga Kerja .....	23

2.6.6 <i>Multiplier Effects</i> .....	24
2.7 Penelitian Terdahulu .....	25
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>28</b>
3.1 Kerangka Konseptual.....	28
3.2 Strategi Pembangunan Sektor Pariwisata.....	30
<b>BAB IV METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
4.1 Desain Penelitian .....	32
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
4.3 Populasi dan Sampel.....	32
4.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	33
4.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
4.6 Metode Analisis Data.....	34
4.6.1 Analisis Potensi dan Kontribusi .....	34
4.6.2 Analisis SWOT.....	35
4.7 Definisi Operasional .....	39
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
5.1 Deskripsi Data .....	40
5.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
5.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	41
5.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	41
5.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja .....	42
5.2 Hasil Penelitian.....	43
5.2.1 Kontribusi Sektor Pariwisata.....	43
5.2.2 Analisis SWOT.....	47
5.2.2.1 Faktor Internal .....	47
5.2.2.2 Faktor Eksternal .....	48
5.2.3 Perhitungan Bobot .....	48
5.2.3.1 Perhitungan Bobot Faktor Internal .....	48
5.2.3.2 Perhitungan Bobot Faktor Eksternal .....	49

5.2.4	Perhitungan Bobot dan Rating Matriks .....	50
5.2.4.1	Perhitungan Matriks <i>Internal Strategic Factors Analysis</i> <i>Summary</i> (IFAS).....	50
5.2.4.2	Perhitungan Matriks <i>Eksternal Strategic Factors Analysis</i> <i>Summary</i> (EFAS) .....	52
5.2.5	Hasil Analisis SWOT.....	53
5.2.6	Perumusan Strategi Melalui Analisis SWOT .....	56
5.2.7	Strategi Yang Tepat Untuk Pengembangan Sektor Pariwisata.....	58
5.2.7.1	Pemetaan Terhadap Potensi Pariwisata .....	58
5.2.7.2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.....	60
5.2.7.3	Pemanfaatan System Teknologi Dalam Peningkatan Pariwisata .....	62
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>65</b>
6.2	Kesimpulan.....	65
6.3	Saran .....	66
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
TABEL 1.1 Target Realisasi PAD .....	3
TABEL 1.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah .....	4
TABEL 1.3 Jumlah Restoran,Rumah Makan dan Cafe .....	5
TABEL 1.4 Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung.....	6
TABEL 1.5 Komponen Penerimaan Pajak Daerah .....	6
TABEL 5.1 Rincian Penyebaran Kuesioner .....	40
TABEL 5.2 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin .....	40
TABEL 5.3 Karakteristik Responden berdasarkan Umur .....	41
TABEL 5.4 Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan .....	42
TABEL 5.5 Karakteristik Responden berdasarkan Masa Kerja .....	42
TABEL 5.6 Kontribusi Sektor Pariwisata .....	44
TABEL 5.7 Data Hasil Kuesioner dan Pemberian Rating Dari Faktor Internal .....	47
TABEL 5.8 Data Hasil Kuesioner dan Pemberian Rating Dari Faktor Eksternal.....	48
TABEL 5.9 Perhitungan Bobot Faktor Internal.....	49
TABEL 5.10 Perhitungan Bobot Faktor Eksternal .....	50
TABEL 5.11 Matriks Kekuatan .....	51
TABEL 5.12 Matriks Kelemahan .....	51
TABEL 5.13 Matriks Peluang.....	52
TABEL 5.14 Matriks Ancaman .....	52
TABEL 5.15 Analisis SWOT.....	54
TABEL 5.16 Prioritas Analisis SWOT .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
GAMBAR 3.1 Kerangka Konseptual .....	30

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Era baru otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi yang lebih luas yang diberikan oleh undang-undang tersebut, daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dan sekaligus roh otonomi daerah (Mardiasmo, 2009).

Penyerahan urusan pemerintahan dan pembangunan kepada daerah kabupaten/kota juga disertai dengan penyerahan kewenangan kepada daerah dalam mencari sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sumber-sumber pembiayaan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan pemerintah pusat dan sumber-sumber lain yang sah. Diantara berbagai sumber pembiayaan tersebut, PAD merupakan sumber yang mempunyai arti penting karena mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah (Bastian, 2010).

Kenyataan menunjukkan banyak daerah yang masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat dalam pembiayaannya karena minimnya PAD yang dimiliki. Padahal banyak daerah kabupaten/kota yang memiliki potensi PAD yang cukup besar, tetapi potensi-potensi tersebut belum dapat dioptimalkan dengan

baik. Hal ini memberikan tantangan kepada daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan PAD dari sektor-sektor potensial melalui kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi penggalan PAD dari berbagai sektor yang potensial (Bappenas, 2011).

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Nordiawan (2006) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD terdiri dari empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pada saat ini kondisinya masih kurang memadai, artinya bahwa proporsi yang disumbangkan PAD terhadap total pendapatan daerah (TPD) masih relatif rendah.

Pendapatan asli daerah (PAD) belum mampu diandalkan sebagai sumber pembiayaan utama otonomi daerah kabupaten dan kota disebabkan oleh beberapa hal berikut: 1). Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah; 2). Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah; 3). Kemampuan administrasi pemungutan di daerah masih rendah; 4). Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah (lihat Mahi, 2005). PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun porsi

PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan dan tingkat perekonomian suatu pemerintahan daerah (Santoso, 1995).

Kabupaten Toraja Utara yang merupakan salah satu daerah otonom terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari PAD, namun didalam pelaksanaannya pengelolaan PAD Kabupaten Toraja Utara belum optimal. Realiasi PAD Kabupaten Toraja Utara selama lima (5) terakhir belum mencapai target. Hal ini disebabkan oleh tingginya penetapan target PAD selama tahun tersebut. Pada tahun 2017, target PAD Kabupaten Toraja Utara mencapai Rp 66,51 miliar, namun realisasi hanya mencapai Rp 44,16 miliar. Sementara itu, pada tahun 2018, target PAD Kabupaten Toraja Utara mencapai Rp.58,22 miliar, namun realisasi hanya mencapai Rp.41,98 miliar.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Rasio Pertumbuhan(%)</b>
2014	25.345.877.930	25.284.957.000,94	99,76	-
2015	39.203.596.900	33.808.407.000,57	86,24	33,71
2016	44.045.099.325	34.896.515.000,55	79,23	3,22
2017	66.508.803.000	44.165.975.209,00	66,41	26,56
2018	58.220.028.100	41.976.382.836,30	72,10	-4,96

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan kemudian turun pada tahun 2018. Pada tahun 2015 dan tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan masing-masing sebesar 33,71 persen dan 26,56 persen. Sementara pada tahun

2016 hanya meningkat sebesar 3,22 persen. Pada tahun 2018 PAD Kabupaten Toraja Utara juga mengalami penurunan sebesar -4,96 persen.

Rendahnya PAD pada hampir sebagian daerah kabupaten/kota di Indonesia adalah salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD (Halim, 2001). Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi daerah untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk itu pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan peningkatan pengelolaan pajak daerah yang berimbas pada meningkatnya pendapatan daerah. Meningkatnya pajak daerah ditentukan oleh komponen pajak daerah itu sendiri. Kabupaten Toraja Utara telah mengupayakan penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, namun dalam pungutan pajak di Kabupaten Toraja Utara dinilai belum maksimal hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.2.

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Toraja Utara dari Tahun 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>
2014	8.911.827.775,00	8.718.949.610,00	97,84	32,32
2015	10.540.390.225,00	10.300.489.724,98	97,72	18,14
2016	12.289.685.375,00	11.040.040.061,60	89,83	7,18
2017	19.443.593.000,00	16.208.699.402,38	83,36	46,82
2018	21.034.818.100,00	18.403.534.804,74	87,49	13,54

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Toraja Utara

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa secara nominal realisasi pajak daerah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2014 sampai tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 realisasi pajak dari target yang ditetapkan mencapai 97,84 persen atau mengalami pertumbuhan sekitar 32,32 persen dari realisasi tahun 2013 kemudian pada tahun 2015 realisasi pajak mencapai 97,72 persen tapi

rasio pertumbuhan menurun menjadi 18,14 persen ditahun 2016 realisasi pajak daerah sebesar 89,83 persen tapi rasio pertumbuhan mengalami penurunan signifikan menjadi 7,18 persen. Tahun 2017 kembali mengalami rasio pertumbuhan sebesar 46,82 persen tetapi pencapaian target realisasi hanya mencapai 83,36 persen. Kemudian tahun 2018 realisasi target pajak kembali naik menjadi 87,49 persen tetapi rasio pertumbuhan kembali menurun menjadi 13,54 persen. Hal ini bisa dilihat bahwa pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Toraja Utara belum maksimal serta persentase efektivitas cenderung berfluktuasi setiap tahunnya dikarenakan target realisasi yang cukup tinggi.

Pajak daerah memiliki beberapa komponen yang masing-masing berkontribusi terhadap PAD. Salah satu komponen pajak daerah yang terus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara adalah pajak restoran, cafe dan rumah makan hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya wisatawan yang masuk di Kabupaten Toraja Utara.

**Tabel 1.3 Jumlah Restoran, Rumah Makan dan Cafe di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Restoran</b>	<b>Rumah Makan</b>	<b>Café</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>
2014	21	62	20	103	
2015	21	68	22	111	7,77
2016	22	115	22	159	43,24
2017	21	144	42	207	30,19
2018	24	152	52	228	10,14

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Toraja Utara.

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat jumlah restoran, rumah makan dan cafe terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sedangkan rasio pertumbuhannya cenderung berfluktuatif. Jumlah pada tahun 2016 dan 2017

menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan rasio pertumbuhan 43 persen dan 30 persen disebabkan adanya lonjakan kenaikan jumlah rumah makan pada tahun tersebut.

**Tabel 1.4 Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wisatawan</b>	<b>Rasio pertumbuhan (%)</b>
2014	112.420	
2015	131.037	16,56
2016	164.521	25,55
2017	285.566	73,57
2018	310.114	8,60

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara

Pada Tabel 1.4 dapat dilihat jumlah wisatawan yang masuk Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sampai tahun 2017 terus tumbuh signifikan sampai 73,53 persen kemudian mengalami penurunan rasio pertumbuhan sebesar 8,60 pada tahun 2018 tetapi jumlah wisatawan tetap meningkat sebanyak 310.114 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang masuk di Kabupaten Toraja Utara terus meningkat tetapi rasio pertumbuhan cenderung berfluktuasi.

**Tabel 1.5 Komponen Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Toraja Utara Pada Tahun 2014-2018 (persen)**

<b>Jenis Pajak</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Pajak Hotel	8,66	10,21	10,87	9,29	9,74
Pajak Restoran, Cafe dan Rumahh Makan	4,87	7,35	9,76	11,04	11,98
Pajak Hiburan	0,02	0,04	0,50	0,33	0,28
Pajak Reklame	2,64	3,21	2,13	2,20	2,10
Pajak Penerangan Jalan	37,66	34,28	35,35	29,59	28,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15,67	14,58	13,25	17,63	12,81

<b>Jenis Pajak</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	0,00	0,16	0,39	0,23	0,15
PBB Pedesaan dan Perkotaan	21,94	20,44	22,58	24,42	22,01
BPHTB	8,54	9,73	5,18	5,28	12,93

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Toraja Utara.

Berdasarkan Tabel 1.5, kontribusi pajak hotel, restoran, cafe dan rumah makan masih lebih kecil dibandingkan dengan pajak lainnya seperti pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak PBB pedesaan dan perkotaan padahal jumlah hotel, restoran, cafe dan rumah makan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan belum efektifnya kontribusi pajak hotel, restoran, cafe dan rumah makan di Kabupaten Toraja Utara. Belum efektifnya kontribusi pajak restoran, cafe dan rumah makan dipengaruhi oleh belum adanya upaya pemerintah daerah dalam menganalisis potensi pajak tersebut.

Salah satu potensi PAD Kabupaten Toraja Utara adalah dari sektor pariwisata, yang merupakan keunggulan kompetitif Kabupaten Kabupaten Toraja Utara karena letak dan kondisi geografisnya di daerah dataran tinggi dengan iklim yang sejuk. Salah satu potensi besar yang dapat menjadi modal pembangunan di Kabupaten Toraja Utara adalah kekayaan potensi pariwisata berbasis alam. Penyelenggaraan sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pariwisata. Meskipun penyelenggaraan sektor ini telah diatur namun belum sesuai dengan harapan bahwa sektor ini mampu menyumbang pendapatan daerah. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan Kabupaten Kabupaten Toraja Utara dalam meningkatkan PAD, sehingga dalam

rencana pembangunan menempatkan pariwisata sebagai komponen pembangunan yang utama. Namun, sayangnya potensi tersebut belum mampu dikembangkan dalam mendorong PAD Kabupaten Toraja Utara. Hal ini karena belum adanya penelitian mendalam mengenai kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Serta strategi apa yang diperlukan untuk mengembangkan sektor pariwisata agar dapat memberi sumbangan besar terhadap pendapatan daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Peningkatan PAD Kabupaten Toraja Utara dari sektor pariwisata sangat dimungkinkan karena ketersediaan berbagai potensi pariwisata yang ada serta dukungan pemerintah daerah dalam bentuk regulasi. Namun potensi pariwisata yang besar tersebut akan tetap merupakan potensi apabila tidak dikelola dengan baik. Peningkatan PAD dari sektor pariwisata tidak mungkin dapat diwujudkan apabila Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tidak melakukan langkah-langkah yang proaktif, baik melalui kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi penggalan PAD dari sektor pariwisata. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan masalah (research problems) sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara ?
2. Strategi apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan sektor pariwisata sehingga mampu mendukung peningkatan PAD di Kabupaten Toraja Utara ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara.
2. Merumuskan strategi yang perlu dilakukan untuk mengembangkan sektor pariwisata sehingga mampu mendukung peningkatan PAD di Kabupaten Toraja Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara dalam rangka meningkatkan PAD.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Desentralisasi Fiskal: Aspek Teori**

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu konsep dalam teori ekonomi publik dan secara umum digunakan untuk mengukur kebijakan dalam reformasi sektor publik. Desentralisasi fiskal dimaksudkan sebagai tanggung jawab penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah (Yuskhov, 2015).

Rondinelli (1998) menyatakan desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan parastatal (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. Perbedaan konsep desentralisasi ditentukan terutama berdasarkan tingkat kewenangan untuk perencanaan, memutuskan dan mengelola kewenangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat dan besaran otonomi yang diterima untuk penyediaan barang publik.

Menurut teori ekonomi publik, fungsi ekonomi pemerintah terdiri dari 3 fungsi yaitu (Musgrave, 1984): (i) Fungsi alokasi, sangat terkait erat dengan kewenangan utama bagi pemerintah daerah karena menyangkut alokasi sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Alokasi kepada masyarakat tersebut terutama terhadap barang publik yang nilainya relatif sangat besar tetapi swasta tidak dapat menyediakan. (ii) Fungsi distribusi, peran pemerintah dalam

perekonomian dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi (pendapatan) kepada seluruh masyarakat. Fungsi distribusi ini memiliki keterkaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara proporsional dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal. (iii) Fungsi stabilisasi, dimana peran pemerintah dalam menjamin dan menjaga stabilisasi perekonomian secara makro (agregat) misalnya mengendalikan laju inflasi, keseimbangan neraca pembayaran, pertumbuhan dan lain-lain. Oleh karena itu fungsi ini berkaitan erat dengan fungsi variabel ekonomi makro dengan berbagai instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Ditinjau dari cara penyediaannya, barang publik dapat dibedakan barang lokal (*local public goods*) dan barang publik nasional (*national public goods*). Jadi muncul suatu kondisi yang mengharuskan pembagian kerja antar strata pemerintahan tentang “siapa mengerjakan apa”. Konsep desentralisasi fiskal dengan demikian seperti dirumuskan oleh Demello (2000) adalah dimaksudkan untuk memindahkan atau menyerahkan sumber-sumber pendapatan dan faktor-faktor pengeluaran ke daerah dengan mengurangi birokrasi pemerintahan. Dengan membawa pemerintah lebih dekat ke masyarakat, desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong efisiensi sektor publik, juga akuntabilitas publik dan transparansi dalam penyediaan jasa publik serta pembuatan keputusan yang transparan dan demokratis.

Berbagai kajian dampak desentralisasi terhadap perekonomian dan *public services delivery* dapat dijelaskan dalam kerangka teori *fiscal federalism*. Teori ini

dibagi dalam dua perspektif, yaitu teori tradisional atau teori generasi pertama (*First Generation Theories*) dan teori perspektif baru atau teori generasi kedua (*Second Generation Theories*). Dalam pandangan teori generasi pertama terdapat dua pendapat yang menekankan keuntungan alokatif desentralisasi.

Pertama, adalah tentang penggunaan *knowledge in society*, yang menurut Hayek (1945) proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya. Dalam konteks keuangan publik, pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih baik dibanding pemerintah pusat tentang kondisi daerah masing-masing, sehingga pemerintah daerah akan lebih baik dalam pengambilan keputusan penyediaan barang dan jasa publik dibanding penyediaan hal tersebut oleh pemerintah pusat. Keadaan ini disebut *allocative efficiency*.

Kedua, Tiebout (1956) memperkenalkan dimensi persaingan dalam pemerintah dan kompetisi antar daerah tentang alokasi pengeluaran publik memungkinkan masyarakat memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan selera dan keinginan mereka. Hal ini tidak terjadi jika pemerintah pusat sebagai penyedia barang dan jasa publik yang seragam. Perhatian teori ini tidak menekankan pada kemampuan pemerintah daerah untuk *self financing* dalam membiayai pengeluaran. Pola ini sama dengan definisi devolusi pada desentralisasi administratif.

Selanjutnya dalam pandangan teori generasi kedua yang dibangun oleh Musgrave (1984) lebih menekankan pentingnya *revenue* dan *expenditure*

*assignment* antar level pemerintahan. Teori ini menjelaskan bagaimana desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap perilaku pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat peraturan tentang ekonomi lokal, maka campur tangan pemerintah pusat dalam perekonomian daerah dibatasi. Dengan demikian teori generasi kedua ini mendasarkan pada 2 mekanisme dalam menyelaraskan antara kepentingan pemerintah daerah dengan kemakmuran ekonomi, interaksi horisontal antar pemerintah daerah, interaksi vertikal antar level pemerintahan.

Mekanisme tersebut adalah dalam keadaan pasar barang dan jasa mobilitasnya tinggi, kompetisi antar pemerintah daerah merupakan alat insentif yang penting bagi penyediaan jasa- jasa publik. Persaingan antar pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada pasar akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebaliknya jika peraturan pemerintah daerah dan penyediaan barang/jasa publik tidak bersahabat dengan pasar dan masyarakat, maka akan menimbulkan mobilitas faktor produksi ke daerah lain dan selanjutnya akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Keterkaitan yang erat antara penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah juga menjadi insentif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi daerah. Dengan demikian transfer dari pemerintah pusat yang besar akan menimbulkan disinsentif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah. Dengan demikian perbedaan pokok kedua teori

tersebut adalah terletak pada pandangan revenue transfer. Keterkaitan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah serta pembatasan redistribusi pemerintah pusat kepada daerah akan menciptakan insentif bagi pemerintah daerah dalam melakukan reformasi orientasi pasar.

## **2.2. Pendapatan Asli Daerah**

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah (Firdausy, 2018). Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*), dan melaksanakan pembangunan (*development function*). Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kewenangan antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dalam rangka memenuhi prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, kepada daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk membiayai berbagai tugas dan tanggungjawabnya sebagai daerah otonom. Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

### **2.3. Potensi Peningkatan PAD dari Pariwisata**

Dalam melakukan perjalanan wisata, seorang wisatawan memerlukan bermacam jasa dan produk wisata yang dibutuhkannya. Berbagai macam jasa dan produk wisata inilah yang disebut dengan Komponen Pariwisata. Komponen pariwisata ini dapat disediakan oleh pihak pengusaha, masyarakat atau siapapun yang berminat untuk menyediakan jasa pariwisata. Komponen pariwisata ini bisa meliputi, (i) Objek dan daya tarik wisata; (ii) Akomodasi; (iii) Angkutan Wisata; (iv) Sarana dan fasilitas wisata; dan (v) Prasarana wisata.

Dengan mengetahui komponen pariwisata diatas, maka pengembangan pembangunan pariwisata bisa terarah dengan baik. Banyak sekali manfaat yang bisa didapat jika pembangunan pariwisata ini terarah dan bisa memancing minat

wisatawan untuk berkunjung. Beberapa manfaat dalam pembangunan pariwisata ini antara lain:

1. Manfaat ekonomi antara lain, (1) Adanya penerimaan devisa atau Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Adanya kesempatan untuk berusaha; (3) Terbukanya lapangan kerja; (4) Meningkatnya pendapatan masyarakat dan pemerintah; (5) Mendorong pembangunan daerah.
2. Manfaat sosial budaya antara lain, (1) Pelestarian budaya dan adat istiadat; (2) Meningkatkan kecerdasan masyarakat; (3) Mengurangi konflik sosial.
3. Manfaat dalam berbangsa dan bernegara antara lain, (1) Mempererat persatuan; (2) Menumbuhkan rasa memiliki; (3) Memelihara hubungan baik internasional dalam hal pengembangan pariwisata.

#### 4. Manfaat Bagi Lingkungan

Arah pembangunan pariwisata agar dapat memenuhi keinginan wisatawan seperti bersih, jauh dari populasi, santai, dan sejuk akan memberikan upaya dalam pengembangan untuk melestarikan lingkungan supaya hijau dan bersih.

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka otonomi daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat harus dapat menggali potensi-potensi yang ada di daerah. Dalam hal ini potensi-potensi yang ada di daerah berkenaan dengan pariwisata yang bertujuan dapat meningkatkan PAD.

## 2.4. Konsep Pariwisata

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Kepariwisataan bertujuan untuk (i) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (ii) Meningkatkan kesejahteraan rakyat; (iii) Menghapus kemiskinan; (iv) Mengatasi pengangguran; (v) Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; (vi) Memajukan kebudayaan; (vii) Mengangkat citra bangsa; (viii) Memperkukuh jati diri dan persatuan bangsa; (ix) Memupuk rasa cinta tanah air, mempererat persahabatan antar bangsa.

Menurut UN-WTO (dalam I Gde dan Diarta, 2009), ada tiga elemen dasar dalam pengertian pariwisata secara holistik yaitu: (1) *domestic tourism* (residen/penduduk yang mengunjungi/mengadakan perjalanan wisata dalam wilayah negaranya); (2) *inbound tourism* (non-residen/bukan penduduk yang mengadakan perjalanan wisata, masuk ke negara tertentu); (3) *outbound tourism* (residen/penduduk yang melakukan perjalanan wisata ke negara lain). Ketiga bentuk pariwisata ini dapat dikombinasikan sedemikian rupa sehingga dapat

diturunkan tiga kategori lagi, yaitu: (1) *internal tourism* (termasuk *domestic tourism* dan *inbound tourism*); (2) *national tourism* (termasuk *domestic tourism* dan *outbound tourism*). (3) *international tourism* (termasuk *inbound* dan *outbound tourism*).

Cohen (dalam I Gde dan Diarta, 2009) mengklasifikasikan wisatawan atas dasar tingkat familiarisasi dari daerah yang akan dikunjungi, serta tingkat pengorganisasian perjalanan wisatanya. Atas dasar ini, Cohen menggolongkan wisatawan menjadi empat, yaitu:

1. *Drifter*, yaitu wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang sama sekali belum diketahuinya, yang bepergian dalam jumlah kecil.
2. *Explorer*, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan dengan mengatur perjalanannya sendiri, tidak mau mengikuti jalan-jalan wisata yang sudah umum melainkan mencari hal yang tidak umum (*off the beaten track*). Wisatawan seperti ini bersedia memanfaatkan fasilitas dengan standar local dan tingkat interaksinya dengan masyarakat lokal juga tinggi.
3. *Individual Mass Tourist*, yaitu wisatawan yang menyerahkan pengaturan perjalanannya kepada agen perjalanan, dan mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah terkenal.
4. *Organized-Mass Tourist*, yaitu wisatawan yang hanya mau mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah dikenal, dengan fasilitas seperti yang dapat ditemuinya di tempat tinggalnya, dan perjalanannya selalu dipandu

oleh pemandu wisata. Wisatawan seperti ini sangat terkungkung oleh apa yang disebut sebagai *environmental bubble*.

Mill dan Morrison (I Gde dan Diarta, 2009) juga mengembangkan sebuah model sistem pariwisata, yang terdiri dari empat komponen utama berikut: (1) *market (reaching the marketplace)*; (2) *travel (the purchase of travel products)*; (3) *destination (the shape of travel demand)*, (4) *marketing (the selling of travel)*.

## **2.5. Prinsip Dasar Kebijakan Pengelolaan Pariwisata**

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Menurut Cox (dalam I Gde dan Diarta, 2009), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut: (1) Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan; (2) Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata; (3) Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal; (4) Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal; (5) Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas

pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut UN-WTO, peran pemerintah dalam menentukan kebijakan pariwisata sangat strategis dan bertanggung jawab terhadap beberapa hal berikut; (a) Membangun kerangka (*framework*) operasional di mana sektor publik dan swasta terlibat dalam menggerakkan denyut pariwisata; (b) Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi, dan kontrol yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan, dan pelestarian budaya serta warisan budaya; (c) Menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi darat, laut dan udara dengan kelengkapan prasarana komunikasinya; (d) Membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata; (e) Menerjemahkan kebijakan pariwisata yang disusun ke dalam rencana kongkret yang mungkin termasuk di dalamnya : (a) evaluasi kekayaan aset pariwisata, alam dan budaya serta mekanisme perlindungan dan pelestariannya; (b) identifikasi dan kategorisasi produk pariwisata yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif; (c) menentukan persyaratan dan ketentuan penyediaan infrastruktur dan suprastruktur yang dibutuhkan yang akan berdampak pada keragaan (*performance*) pariwisata, dan; (d) mengelaborasi program untuk pembiayaan dalam aktivitas pariwisata, baik untuk sektor publik maupun swasta.

Dalam mencapai kesuksesan dalam pembangunan pariwisata diperlukan pemahaman baik dan sisi pemerintah selaku *regulator* maupun dari sisi pengusaha selaku pelaku bisnis. Pemerintah tentu harus memperhatikan dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata itu akan mampu memberikan keuntungan sekaligus menekan biaya sosial ekonomi serta dampak lingkungan sekecil mungkin. Di sisi lain, pebisnis yang lebih terfokus dan berorientasi keuntungan tentu tidak bisa seenaknya melakukan segala sesuatu demi mencapai keuntungan, tetapi harus menyesuaikan dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah. Misalnya melalui peraturan tata ruang, perijinan, lisensi, akreditasi, dan perundang-undangan.

Liu (I Gde dan Diarta, 2009) membuat kerangka implementasi kebijakan pariwisata yang paling tidak menyentuh empat aspek, yaitu: (1) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur; (2) Aktivitas pemasaran; (3) Peningkatan kualitas budaya dan lingkungan; serta; (4) Pengembangan sumber daya manusia.

## **2.6. Dampak Positif Pariwisata Bagi Perekonomian**

Ada banyak dampak positif pariwisata bagi perekonomian, diantaranya adalah sebagai berikut (I Gde dan Diarta, 2009).

### **2.6.1. Pendapatan dari Penukaran Valuta Asing**

Hal ini terjadi pada wisatawan asing. Walau di beberapa negara pendapatan dari penukaran valuta asing tidak begitu besar, namun beberapa Negara, missal New Zealand dan Australia, pendapatan dari penukaran valuta

asing ini sangat besar nilainya dan berperan secara sangat signifikan. Bahkan untuk New Zealand pada tahun 90-an menempati peringkat pertama sumbangannya, yaitu 2.277 miilyar NZD dibandingkan sumbangan industri daging (2.195 milyar NZD), wool (1.811 milyar NZD), susu dan turunannya (1.733 milyar NZD) (Leiper, 1990).

### **2.6.2. Menyehatkan Neraca Perdagangan Luar Negeri**

Surplus dari pendapatan penukaran valuta asing akan menyebabkan neraca perdagangan menjadi semakin sehat. Hal ini akan mendorong suatu negara mampu mengimpor beragam barang, pelayanan dan modal untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

### **2.6.3. Pendapatan dari Usaha atau Bisnis Pariwisata**

Pengeluaran dari wisatawan secara langsung ataupun tidak langsung merupakan sumber pendapatan dari beberapa perusahaan, organisasi, atau masyarakat perorangan yang melakukan usaha di sektor pariwisata. Jumlah wisatawan yang banyak merupakan pasar bagi produk lokal. Masyarakat secara perorangan juga mendapat penghasilan jika mereka bekerja dan mendapat upah dari pekerjaan tersebut. Pekerjaan di sektor pariwisata sangat beragam, seperti pengusaha pariwisata, karyawan hotel dan restoran, karyawan agen perjalanan, penyedia jasa transportasi, pemandu wisata, penyedia *souvenir*, atraksi wisata, dan seterusnya.

Pendapatan dari hasil kerja di usaha pariwisata merupakan dampak sekunder sedangkan dampak primernya berupa pendapatan bisnis organisasi atau

perusahaan serta pendaparan devisa negara. Bagi perusahaan, pendapatan primer inilah yang dipakai untuk membayar gaji dan upah pekerjanya, serta berupa deviden bagi pemilik usaha.

#### **2.6.4. Pendapatan Pemerintah**

Pemerintah memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata dari beberapa cara. Beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia, telah membuktikan sumbangan sektor pariwisata terhadap pendapatan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah negara manapun menaruh perhatian besar untuk berusaha menarik sebanyak-banyaknya wisatawan asing untuk berlibur ke negaranya.

Sumbangan pendapatan terbesar dari pariwisata bersumber dari pengenaan pajak. Sebagai contoh, pengenaan pajak hotel dan restoran yang "merupakan bagian dari keuntungan usaha pariwisata hotel dan restoran tersebut. Sumber lain bisa berupa usaha pariwisata yang dimiliki oleh pemerintah sendiri. Pemerintah juga mengenakan pajak secara langsung kepada wisatawan jika mereka melakukan transaksi yang tergolong kena pajak. Biasanya di banyak negara dikenal sebagai *service tax*, yang umumnya sebesar 10% untuk transaksi di hotel dan restoran. Pajak ini berbeda dari pajak yang sumbernya dari keuntungan hotel dan restoran yang diuraikan sebelumnya.

#### **2.6.5. Penyerapan Tenaga Kerja**

Banyak individu menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang tidak bisa berdiri sendiri tetapi memerlukan dukungan dari sektor lain. Baik sektor pariwisata maupun sektor-sektor lain yang

berhubungan dengan sektor pariwisata tidak dapat dipungkiri merupakan lapangan kerja yang menyerap begitu banyak tenaga kerja.

#### **2.6.6. Multiplier Effects**

Efek *multiplier* merupakan efek ekonomi yang ditimbulkan kegiatan ekonomi pariwisata terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan suatu wilayah (daerah, negara) tertentu. Jika seorang wisatawan mengeluarkan 1 USD atau mungkin 1.000 USD, uang tersebut akan menjadi pendapatan bagi penerimanya, misalnya pemilik toko *souvenir*. Pemilik toko *souvenir* tersebut memakai uang tersebut seluruhnya atau sebagian untuk membeli bahan-bahan kerajinan *souvenir-nya* untuk dijual kembali di tokonya, membayar gaji karyawan tokonya, membayar pajak, listrik, air dan seterusnya.

Penerima uang dari pemilik toko *souvenir* ini kembali menjadi sumber pendapatan bagi pihak lain. Ini adalah perputaran uang yang ketiga setelah wisatawan - pemilik toko - pemilik bahan kerajinan, karyawan, dan lainnya. Semakin panjang perjalanan uang tersebut, jumlahnya akan semakin mengecil karena mungkin sebagian dari pendapatan tersebut disimpan atau ditabung oleh masing-masing pihak, atau bahkan mungkin keluar dari perputaran aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Sebagai contoh, pemilik hotel dan restoran dengan jaringan internasional seringkali tidak berasal dari warga negara di tujuan wisata tetapi berasal dari luar negeri sehingga hal ini menimbulkan kebocoran ekonomi (*economic leakage*).

Rasio antara total pengeluaran dari setiap putaran ekonomi dibanding dengan jumlah asli atau permulaan yang dikeluarkan oleh wisatawan dinamakan *multiplier*. Dari contoh di atas, jika pengeluaran wisatawan yang 1.000 USD mampu mendorong berputarnya mesin ekonomi sejauh tiga tahapan seperti di atas, dengan total pengeluaran dari ketiga tahap tersebut 1.250 USD, maka dikatakan memiliki efek *multiplier* sebesar 1,25. Terdapat beragam efek *multiplier* yang dapat dihitung dari kegiatan pariwisata, yaitu *expenditure*, *employment*, *income*, dan sebagainya. Pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat lokal

Wisatawan dan masyarakat lokal sering berbagi fasilitas untuk berbagai kepentingan. Dalam beberapa kasus, keberadaan pariwisata di suatu daerah atau negara tujuan wisata menjadi perbedaan kritis dari nilai ekonomi fasilitas pariwisata tersebut. Banyaknya wisatawan mendatangkan keuntungan yang cukup besar sehingga suatu fasilitas dapat digratiskan pemanfaatannya bagi masyarakat lokal.

## **2.7. Penelitian Terdahulu**

M. Rois Muchlisin (2019) meneliti tentang Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018, dimana hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kontribusi pariwisata terhadap PAD memiliki pengaruh dan dibuktikan dengan Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 – 2018 mengalami peningkatan terus. Pada tahun 2018 penerimaan sektor pariwisata dari pajak Hotel dan restoran

berada diposisi nomor empat dan dari retribusi pariwisata berada pada nomor lima di dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menjelaskan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor potensial bagi penerimaan daerah. Rata-rata kontribusi sektor pariwisata selama lima tahun sebesar 1,05% terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan sebesar 0,13%.

Nita Bonita (2016) yang berjudul Peran dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Labuan cermin di kabupaten berau. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Prasarana dan sarana yang perlu dikembangkan di kawasan wisata Labuan Cermin perlu dilihat dari 3A yakni aksesibilitas, amenitas, dan atraksi sesuai dengan penjelasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

Fawaidul Khoir (2018) Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2017. Hasil analisis kontribusi pada penelitian ini menunjukkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD yang setiap tahunnya mengalami fluktuatif, meskipun setiap tahunnya pendapatan dari sektor pariwisata selalu mengalami kenaikan. Kontribusi terbesar terdapat pada tahun 2011 yaitu sebesar 3,96%. Kontribusi terbesar ini disebabkan karena pendapatan sektor pariwisata dari penerimaan retribusi tempat parkir khusus cukup besar serta kecilnya peningkatan penerimaan sektor-sektor PAD lainnya yang sah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kontribusi terendah terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar 2,87%. Penurunan ini disebabkan karena peningkatan penerimaan dari sumber Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang Sah yang sangat tinggi. Sehingga menyebabkan kontribusi sektor pariwisata sangat kecil meskipun total pendapatan dari sektor pariwisata sendiri mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Fiqih Umi Zakiah (2019) Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Membangun Infrastruktur Kota Bandar Lampung Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Periode 2010-2017. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa sektor pariwisata memiliki pengaruh positif terhadap PAD di Kota Bandar Lampung.

## **BAB III**

### **KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **3.1. Kerangka Konseptual**

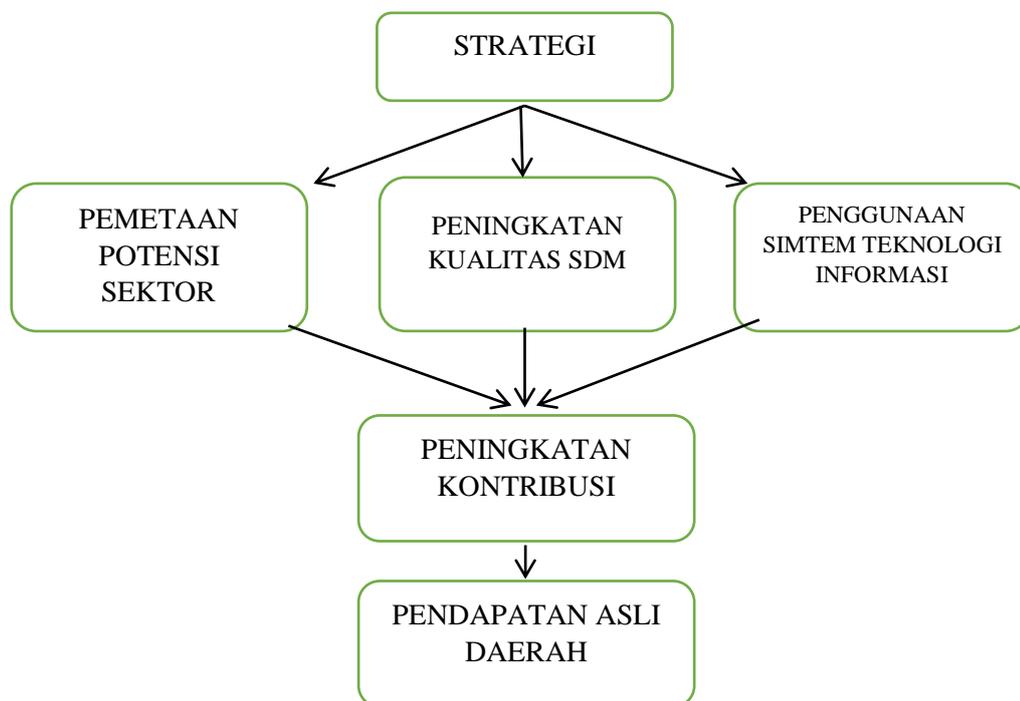
Metodologi penelitian secara umum yaitu suatu ilmu mengenai sistem, ataupun langkah dalam melakukan investigasi. Sedangkan penelitian yaitu langkah investigasi untuk memperoleh tambahan informasi, fakta baru dan sebagainya yang bersifat mendalam, beragam tetapi tidak lazim seperti biasanya. Apabila dilihat dari tempat sumber datanya, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari letak kejadian yang menjadi objek penelitian selama penelitian berlangsung, sehingga memperoleh informasi secara langsung dan terbaru yang berhubungan dengan masalah yang terkait, serta sebagai cross checking terhadap beberapa bahan yang sudah ada.

Apabila dilihat dari segi sifat-sifat data penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami kejadian tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, tindakan, motivasi dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk bahasa dan kata-kata, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Apabila dilihat dari sudut kemampuan atau kemungkinan penelitian dapat memberikan informasi atau penjelasan, maka penelitian ini tergolong penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk

mendeskripsikan terkait elemen sosial tertentu yang meliputi individu, masyarakat, kelompok dan lembaga. Penelitian deskriptif mempunyai 4 tipe penelitian yaitu penelitian studi kasus, survey, penelitian kausal, dan penelitian korelasional. Selain itu, penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian studi kasus (*case research*), yaitu penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada suatu keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan berbagai sumber data.

Pariwisata saat ini merupakan kebutuhan utama yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara (Rois, Fadliyanti, dan Wijimulawiani, 2017). Beberapa ekonom telah meneliti bahwa pariwisata menjadi salah satu yang berkontribusi langsung bagi pendapatan suatu negara (Dritsakis, 2004). Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengatakan bahwa sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perdagangan, perikanan, peternakan, perindustrian, dan pertambangan merupakan potensi pendapatan yang dimiliki daerah Toraja Utara. Sektor pariwisata merupakan sektor yang memberikan pemasukan cukup besar terhadap penerimaan daerah di Toraja Utara.



**Gambar 3.1 Kerangka Konseptual**

### **3.2 Kontribusi dan Strategi Pembangunan Sektor Pariwisata**

#### **1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD**

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui kontribusi retribusi pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pariwisata dalam pendapatan asli daerah yaitu menggunakan rumus kontribusi yang merupakan perbandingan antara jumlah retribusi pariwisata dengan pendapatan asli daerah yang kemudian dikalikan dengan 100%.

## 2. Strategi Pembangunan Sektor Pariwisata

Merumuskan strategi yang perlu dilakukan untuk mengembangkan sektor pariwisata sehingga mampu mendukung peningkatan PAD di Kabupaten Toraja Utara. Pertama, melaksanakan pemetaan potensi-potensi wilayah yang bisa menjadi objek wisata, Peningkatan kapasitas masyarakat merupakan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pariwisata, dan melakukan pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan system teknologi.